

Budaya Penjulukan dan Bahasa Agama

Oleh DADANG S. ANSHORI

Bahasa kerap kali menjadi alat bagi seseorang atau suatu kelompok untuk melanggengkan kepentingannya. Dengan berbahasa, seseorang dimungkinkan dijatuhkan dan diserang oleh kelompok lainnya. Sejak reformasi bergulir ada semacam keagairahan dalam berbahasa, namun juga muncul kekhawatiran atas hilangnya kesantunan bahasa selain berbagai gejala *hiperbola* (berlebihan) muncul bersamaan. Kata-kata klasik Napoleon Bonaparte, bahwa untuk bisa mengurus negara, harus ditertibkan dahulu bahasanya, semakin terasa urgen. Sudah dipastikan bahwa di Indonesia, termasuk dalam dimensi hukum, penuh dengan ketidakpastian, multi tafsir, beragam interpretasi, dan lahir berbagai *interest* dibalik simbol-simbol bahasa. Bahasa memang *arbitrer* (manasuka) bahkan para ahli komunikasi sepakat bahwa bahasa hanya sebagai simbol tak bermakna. Makna bahasa ada pada kepala manusia (*word not mean, but men is mean*). Namun demikian “ugeran” sosial (pragmatik) bahasa tetap menjadi bagian dari identitas budaya bahasa manusia.

Ketidaktertiban bahasa itu bukan hanya tampak dalam “seremonial” politik, namun juga dipakai dalam berbagai simbol agama. Agama yang murni dan suci dihadapkan oleh sebagian orang dengan kacau balau sosial yang palsu. Banyak pihak yang bersembunyi dan “hidup” di balik agama sebagaimana banyak pihak yang bicara “atas nama” rakyat, padahal rakyat tidak tahu siapa dia. Pada gilirannya kita pun dipaksa harus paham, bahwa “rakyat partai” juga rakyat. Rakyat inilah yang menjadi “dagelan” para elit politik kita untuk memperjuangkan *interest* pribadinya dan kelompoknya. Sayangnya mereka yang menghadapkan agama dengan kepalsuan sosial, selalu memakai simbol-simbol agama baik simbol lahiriah maupun simbol propaganda bahasa, baik dalam bahasa politik maupun dalam bahasa agama. Simbol-simbol itu dipaksakan dengan radikal (kekerasan) sehingga publik menyimak melalui bahasa-bahasa yang penuh kekerasan. Simak misalnya “pertempuran bahasa” antara kelompok pro Akbar Tanjung dengan anti Akbar Tanjung atau “pertarungan” pro syariat Islam dengan kontra syariat Islam, semuanya menunjukkan penggunaan bahasa yang ekstrim dan keras. Dalam istilah lain, inilah yang disebut dengan *regimentasi linguistik*, bahasa menjadi kompartemen kekuasaan.

Menurut Ariel Heryanto (1989:15-16) bahasa (termasuk bahasa Indonesia) pada hakikatnya merupakan komoditas industrial. Bahasa tidak lahir dan tumbuh dari dinamika komunal masyarakat, tetapi merupakan produk rekayasa para profesional yang dirancang untuk dipasarkan secara massal. Bahasa ini bukan bahasa ibu bagi makhluk manapun di planet ini. Penutur bahasa ini hanyalah para konsumen yang hanya dapat bergantung pada sesuatu keputusan para pejabat “pembinaan dan pengembangan” bahasa sebagai komoditas, tidak aneh jika nilai bahasa ini dapat dihayati dengan jargon ekonomi. Bahasa Indonesia “yang baik dan benar” merupakan komoditi yang langka.

Penjulukan: Sebuah Budaya Bahasa

Politisasi bahasa yang paling kentara dan sering dipergunakan oleh penguasa dan masyarakat adalah penjulukan (*labeling*). Istilah ini bahkan dipergunakan sejak pemerintah Orde Lama dengan menyebut “anti revolusioner” kepada mereka yang menentang Presiden Soekarno. Pada masa Orde Baru muncul istilah-istilah *ekstrim*

kanan, ekstrim kiri, anti Pancasila, subversif, anti pembangunan, provokator, OTB, GPK dll. Pada masa revolusi juga berkembang istilah-istilah *ninja, makar, fundamentalis, kelompok Islam, kelompok nasionalisme, kaukus* dll. Presiden ke-4, Abdurahman Wahid, adalah orang yang sering memberikan penjulukan pada suatu peristiwa, misalnya “Jenderal K” kepada dalang kerusuhan Ambon, atau “makar” kepada mantan Sekjen Dephutbun Suropto, walaupun kemudian meminta maaf kepada Suropto setelah dipertemukan oleh Sri Edi Swasono, Agus Miftach, dan Nurmahmudi Islam di kediaman Bung Hatta, 16 November 2001 (*Tempo*, 17 November 2001).

Penjulukan ini akan sangat kuat mempengaruhi persepsi dan pandangan umum dan merugikan pihak yang dijuluki. Kasus masih aktual adalah pembentukan opini kerusuhan yang dilakukan pendukung Inggris membuat panitia FIFA World Cup 2002 harus melakukan ekstra ketat pada pertandingan perdana kesebelasan Inggris, dan pihak panitia merasa lega ketika kerusuhan tersebut tak kunjung tiba. Penjulukan serupa dialami oleh pendukung kesebelasan sepakbola asal Surabaya yang dikenal dengan nama “bonek”. Banyak pihak yang merasa dirugikan oleh julukan tersebut, karena terbentuk opini bahwa pendukung kesebelasan Surabaya adalah perusuh dan perusak fasilitas umum, terlebih apabila tim kesayangannya kalah. Apakah semua pendukung kesebelasan Surabaya perusuh? Tentu tidak, banyak di antara mereka yang baik-baik dan menjadikan sepakbola sebagai hiburan bukan media kerusuhan. Namun publik telah memberi “stempel” bahwa mereka perusuh dan perusak.

Deddy Mulyana (1999) memberikan beberapa contoh tentang pembentukan persepsi publik akibat penjulukan ini.

Juni 1997, di Kabupaten Purbalinga satu orang tewas dan empat orang luka parah akibat dikeroyok massa, karena mereka diisukan atau dijuluki “hantu pocong”. Padahal seperti dituturkan Kapolres Purbalingga, Letkol Pol. Imam Suwangsa, hantu pocong sendiri tidak terbentuk. Satu di antara keempat orang yang luka-luka karena dianiaya itu adalah Siti Maemunah, yang seusai shalat Maghrib, berjalan kaki dengan tetap mengenakan mukena untuk mengunjungi saudaranya di Bojongsari.

Di Demak, Jawa Tengah, Kyai Rochmadi tewas dibantai massa karena diduga mempraktekkan ilmu santet (*Pikiran Rakyat*, 17 Oktober 1998). Sementara itu Serda Yunus Paribong, Serda Hariri dan Serda M. Dahlan tewas dikeroyok massa gara-gara diteriaki “ninja” oleh tersangka pelaku pencurian sepeda motor di Bangkalan, Madura, padahal mereka justru tengah mengejar pencuri tersebut (*Republika*, 2 November 1998).

Istilah “Orde Baru” adalah penjulukan yang terbentuk sangat kuat dan mempengaruhi opini publik. Mereka yang “Orde Baru” adalah yang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka yang memakan uang rakyat. Mereka yang merusak sistem bernegara dan mengacaukan perekonomian rakyat. Mereka yang rakus dan kenyang karena menghisap darah rakyat. Mereka yang harus diadili dan dipenjarakan. Mereka yang tidak lagi mendapatkan maaf dari rakyat karena “dosa-dosanya”. Benarkan mereka yang berkuasa di zaman Orde Baru semuanya melakukan perbuatan di atas? Tentu tidak. Ada orang yang hidup di zaman orde baru dan menjadi penguasa tetapi tidak melakukan perbuatan di atas. Namun setiap kata “orde baru” diteriakkan, mereka terbawa jelek dan ikut tercemari. Inilah efek dari “penjulukan” yang tidak bisa ditahan oleh “si korban”.

Penjulukan disampaikan melalui koran dengan menggunakan bahasa koran. Dalam pemberitaan dan penyebaran informasi, bahasa penjulukan memiliki muatan berita yang tak kalah menarik. Berbagai istilah di atas, tersebar sedemikian rupa karena koran

membantu mensosialisasikan dan menginstitusionalisasikan bahasa-bahasa tersebut. Pesan yang terbentuk tidak terlepas dari *agenda setting* koran terhadap isu-isu tersebut. Koran melalui bahasanya bisa menjungkirbalikan mitos seakan-akan menjadi nyata, isu menjadi data, dan sesuatu yang misteri menjadi sesuatu yang nyata. Dalam beberapa hal, koran kadang-kadang telah lebih dahulu memberi batasan dan memberikan penilaian terhadap kasus atau sumber pemberitaan dengan tidak menghitung kerugian bagi pihak yang menjadi korban. Bahasa koran, dengan demikian, sebagaimana insan pers menjadi tidak netral.

Bahasa Agama: Kasus Terorisme

Terorisme telah menjadi istilah yang begitu dekat dengan agama (baca Islam). Sejak peristiwa 11 September 2001, istilah terorisme mendapatkan porsi yang berlebihan di berbagai media, terutama Barat. Istilah ini sudah barang tentu menjadi tidak netral lagi, karena terjadi eksploitasi besar-besaran melalui kepala George W. Bush dan di-*blow-up* oleh media Barat. Terorisme sendiri sebenarnya bukan bahasa agama Islam karena Islam tidak mengenal kekerasan. Anehnya, ketika istilah terorisme dipaksakan beririsan dengan Islam, Amerika tetap menyebut dirinya sebagai “Barat” bukan dengan istilah agama: Kristen. Ini padanan kata yang tidak pas, selain bermuatan politik kelas tinggi. Islam hanya bisa dipadankan dengan Kristen atau agama lainnya, sementara Barat hanya bisa dipadankan dengan Timur atau Selatan dan Utara. Ada apa dengan istilah Islam vs Barat?

Terorisme juga sebuah penjulukan yang telah menggantikan posisi istilah *fundamentalisme*. Sebutan bagi mereka yang tidak sepaham dengan Barat: Amerika, apalagi membuat gerakan menentang Amerika. Bagi Barat musuh terbesar setelah Soviet hancur adalah Islam (sesuai hipotesis Huntington), yang kebetulan banyak dianut penghuni wilayah Timur. Fundamentalisme sebagaimana terorisme bukan berakar dari budaya bahasa dan politik Islam. Fundamentalisme, menurut Bernard Lewis, adalah istilah Kristiani yang mempertahankan asal usul kesucian Ilahiah dan ketakungkinan salah (*inerracy*) Injil. Kedua kata itu berubah makna secara total dan diregimentasi oleh kolonialisme Kristiani. Anehnya lagi, Amerika tidak menyebut teroris atau fundamentalis kepada kaum Yahudi yang meratakan ras Arab Palestina atau penganut Kristen yang membuat kekacauan di bebepa belahan dunia ini. Terorisme “diperkosa” maknanya menjadi “pengacau dari kelompok Islam”. Inilah kelicikan Barat yang dimotori Amerika.

Hal yang harus disadari kaum Muslimin adalah bahasa agama, sebagaimana disebutkan Bernard Lewis sudah sangat dipengaruhi (terdistorsi) unsure-unsur luar. “Pertarungan bahasa agama ” yang hampir selalu dimenangkan kaum Kristiani, mengingatkan kita untuk mengubah strategis berdakwah. Sekalipun demikian, bahasa agama dalam implementasinya harus tetap murni sebagai sebuah simbol agama. Oleh karena itu, apabila berbagai pihak hanya bertengker dalam kebesaran agama dan mengeksploitasi agama untuk kepentingan dan pemuasan dirinya, sebaiknya hindari istilah dan justifikasi agama. Dengan berbagai gaya “radikal” yang oleh sebagian kaum Muslim dipertontonkan, di saat kita tidak berdaya menghadapi gempuran media Barat, maka semakin kokohlah opini dunia tentang “radikalisme Islam”. Tampaknya harus ada wilayah lain dari peran *amar ma'ruf nahyi mungkar* yang kita formulasikan kembali?***
Wallahu'alam

Dadang S. Anshori, staf pengajar pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)